

**DAFTAR BACAAN**

**BUKU**

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Anwar, Syamsul, *Mazhab Yogya : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruzz Press, Yogyakarta, 2002.

-----, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. II, Raja Pers, Jakarta, 2010.

Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. III, Kencana, Jakarta, 2007.

Dewi, Gemala, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. III, Kencana, Jakarta, 2007.

Hamid, A. T., *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2011 .

Ibrahim, Johannes & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Ifham, Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Cet. I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. VII, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, KNKG, Jakarta, 2006

-----, *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, KNKG, Jakarta, 2012.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. III, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPFE, Yogyakarta, 1996.
- Naja, H.R. Daeng, *Akad Bank Syariah*, Cet. I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Nieuwenhuis, Mr. J. H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan Djasadin Saraghi), Universitas Airlangga, 1985.
- Notohamidjojo, O., *Masalah : Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Robani Press, Jakarta, 2001.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. XIII, Mizan, Bandung, 1996.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Simamora, Yohanes Sogar, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Cet. II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Simanjuntak, Ricardo, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Cet. II, Kontan Publishing, Jakarta, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Syafii, M. Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Abd. Shomad, dan Ari Kurniawan, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Cet. I, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013.
- Usman, Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Wery, P. L., *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990.

Wibowo, Muh. Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, Biruni Press, Yogyakarta, 2007.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung.

## TESIS

Fachruddin, "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan", *Tesis*, Magister Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2008.

Setyani, Nur Hidayati, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip "Good Corporate Governance" Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syariah", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010.

## MAKALAH

Sjahdeini, Sutan Remy, *Pencegahan dan Penanggulangan Kredit Bermasalah*, Makalah Magister Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 1995.

## JURNAL

Anderson, Jill Pride, "Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance", *Emory Law Journal*, Volume 36, 1987.

Hartkamp, S., "Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands", *American Journal of Comparative Law*, Volume 40, 1992.

Fifi Junita, "Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Permasalahannya dalam Praktek", *Yuridika*, Volume 16 Nomor 3, Mei - Juni 2001.

Khairandy, Ridwan, "Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif", *Jurnal Hukum*, Nomor 3 Volume 14, Juli 2008.

Klein, John, "Good Faith in International Transaction", *The Liverpool Law Review*, Volume XV (2), 1993.

Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16 Nomor 2, Maret 2001.

Marzuki, Peter Mahmud, “Batas-batas Kebebasan Berkontrak”, *Yuridika*, Volume 18 Nomor 3, Mei 2003.

Prasetya, Rudhi, “Analisis Hukum Ekonomi terhadap Kontrak dalam Menyongsong Era Globalisasi”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2, 1997.

Priyono, Ery Agus, “Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Para Pihak)”, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 1 Nomor 1, November 2017.

Setiawan, “Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak”, *Newsletter*, Nomor: 15/IV/Desember/1993, Desember 1993.

Syukron, Ali, “Good Corporate Governance di Bank Syariah”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 1, 2003.

### **BAHAN AJAR DAN SLIDE**

Wulandari, Sinar Ayu, “Hukum Perlindungan Konsumen”, *Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Usanti, Trisadini Prasastinah, “Hukum Perbankan Syariah: Prinsip Bagi Hasil”, *Slide*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.

### **INTERNET**

Achmad Cholil, “Dualisme Peradilan Perkara Ekonomi Syariah”, [http://www.badilag.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7114:dualisme-peradilan-perkara-syariah-&catid=315:berita-kegiatan](http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7114:dualisme-peradilan-perkara-syariah-&catid=315:berita-kegiatan), dikunjungi pada 15 Juni 2012.

Fenty Fumiaty, “Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT ‘Artha Kencana Mulia’ Semarang”, [http://eprints.walisongo.ac.id/1444/3/082311048\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1444/3/082311048_Bab2.pdf) , 2012, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2015.

Gustani, “Prinsip Bagi Hasil Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing”, <http://ekonom-rindang09.blogspot.co.id/2010/05/prinsip-bagi-hasil-revenue-sharing-dan.html>, 1 Mei 2010, dikunjungi pada tanggal 7 Mei 2015.

J. Satrio, “Pelaksanaan Suatu Perjanjian : Pelaksanaan Perjanjian dengan Iktikad Baik”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a619e7c6d757/pelaksanaan-suatu-perjanjian--pelaksanaan-perjanjian-dengan-iktikad-baik>, 19 Januari 2018, dikunjungi pada tanggal 9 April 2019.

Masyhudi Muqorobin, “Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar”, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-tata-kelola-organisasi-laba-detail-186.html>, 12 April 2012, dikunjungi pada 10 April 2019.

Rahmat Hidayat, “Konstruksi Nalar Islam tentang Hukum dan Keadilan”, <https://cakimppcii.wordpress.com/2013/09/27/konstruksi-nalar-islam-tentang-hukum-dan-keadilan/>, 27 September 2013, dikunjungi pada tanggal 11 Juni 2015.

Suci Aprilliani Utami, “Al Kharaj Bi Al Dhaman”, <http://hilmanemira.blogspot.com/2013/05/al-kharaj-bi-al-dhaman.html>, 16 Mei 2013, dikunjungi pada tanggal 15 April 2019.

## **ORASI ILMIAH**

Mariam Darus, *Perkembangan Prinsip Iktikad Baik Sebagai Asas Umum Di Dalam Hukum Indonesia*, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke-60, Medan, Tanggal 11 Januari 2014.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

*Burgelijk Wetboek Voor Indonesia* (BW), *Staatsblat* Nomor 1847-23, Tahun 1948 terjemahan R. Subekti.

*Wetboek van Koophandelen* (WvK), *Staatsblat* Nomor 1847-23, Tahun 2008, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

*Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Staatsblat* Nomor 1941-44, Tahun 1995, terjemahan R. Soesilo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN RI Tahun 1986 Nomor 20, TLN RI Nomor 3327.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN RI Tahun 1989 Nomor 49, TLN RI Nomor 3400.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN RI Tahun 1992 Nomor 31, TLN RI Nomor 3472.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, LN RI Tahun 1995 Nomor 64, TLN RI Nomor 3608.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, LN RI Tahun 1996 Nomor 42, TLN RI Nomor 3632.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN RI Tahun 1998 Nomor 182, TLN RI Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, LN RI Tahun 1999 Nomor 66, TLN RI Nomor 3843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN RI Tahun 1999 Nomor 138, TLN RI Nomor 3872.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN RI Tahun 1999 Nomor 168, TLN RI Nomor 3889.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN RI Tahun 2006 Nomor 22, TLN RI Nomor 4611.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN RI Tahun 2004 Nomor 34, TLN RI Nomor 4379.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 2007 Nomor 106, TLN RI Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, LN RI Tahun 2008 Nomor 94, TLN RI Nomor 4867.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN RI Tahun 2009 Nomor 158, TLN RI Nomor 5077.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN RI Nomor 5078.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, LN RI Tahun 2014 Nomor 337, TLN RI Nomor 5618.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, LN RI Tahun 1992 Nomor 119, TLN RI Nomor 3505.

### **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, LN RI Tahun 2015 Nomor 74, TLN RI Nomor 5687.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, LN RI Tahun 2016 Nomor 170, TLN RI Nomor 5917.

### **Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, LN RI Tahun 2005 Nomor 124 DPbS, TLN RI Nomor 4563.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, LN RI Tahun 2006 Nomor 6 DPNP, TLN RI Nomor 4600.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, LN RI Tahun 2006 Nomor DPNP / DPbS / DPBPR, TLN RI Nomor .

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, LN RI Tahun 2007 Nomor 165 DPbS, TLN RI Nomor 4563.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, LN RI Tahun 2008 Nomor 10 DPNP / DPbS / DPBPR, TLN RI Nomor 4808.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, LN RI Tahun 2008 Nomor 136 DPbS, TLN RI 4896.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, LN RI Tahun 2009 Nomor 175 DPbS, TLN RI Nomor 5085.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 (tanggal 10 September 2008) tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 (tanggal 10 Oktober 2008), Nomor : 09/Bua.6/Hs/SP/X/2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 (tanggal 20 Mei 2010), Nomor : 8/Bua.6/Hs/SP/V/2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

### **Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Cara Pencatatan Hasil Usaha Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil dalam Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Dalam *Murabaha* Tak Mampu Bayar.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyaraqah Mutanaqisah*.



Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal  
24 Desember 2003.